

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>RINGKASAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Sistem Pemerintahan Daerah.....	11
2.2. Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	12
2.3. Teori Perundang-Undangan.....	14
2.4. Tinjauan Umum Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	18
2.5 Tinjauan Umum Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet.....	21

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2,Cara Penentuan Ukuran Sampel.....	33
3.3.Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5.Operasionalisasi Variabel.....	35
<b>BAB IV : KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
4.1.Kabupaten Indragiri Hilir.....	36
4.1.1.Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir.....	36
4.1.2.Iklim dan Curah Hujan.....	39
4.1.3.Penduduk.....	40
4.1.4.Pendidikan.....	41
4.1.5.Mata Pencaharian.....	41
4.2.Dinas Pendapatan Daerah.....	42
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
5.1. Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet.....	46
5.1.1.Pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.....	46
5.1.2.Prosedur dan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet...	50
5.1.3.Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet oleh Dinas Pendapatan Daerah.....	52

5.1.4. Pelayanan Petugas Pajak.....	53
5.1.5. Penerapan Sanksi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kepada Penangkar Burung Walet Yang Tidak Pernah Membayar Pajak Atau Tidak Mengurus Izin Penangkaran Burung Walet.....	55
5.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet agar dapat berjalan efektif.....	57
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>60</b>
6.1. Kesimpulan.....	60
6.2. Rekomendasi.....	62

DAFTAR PUSTAKA